

Pembuatan Peta Administratif Kelurahan Singonegaran sebagai Media Informasi bagi Masyarakat dalam Mendukung Pelayanan Publik

Dimas Agus Prasetyo¹, Viken Wahyuningsih², Marsely Febrian Angeliani³,
Talita Fidela Vania Azarin⁴, Alvia Nurina Afifah⁵, Putri Clarissa Margaretha⁶,
Alfan Nur Rahman⁷, Bagus Amirul Mukmin⁸

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Abstrak— Peta administratif adalah alat informasi ruang yang berperan penting dalam membantu penyelenggaraan layanan publik di tingkat kelurahan. Kelurahan Singonegaran belum memiliki peta yang jelas dan mudah ditemukan oleh warga, sehingga membuat penyampaian informasi mengenai wilayah, batas tugas, serta tempat fasilitas umum menjadi kurang efektif. Program ini bertujuan untuk membuat peta administratif Kelurahan Singonegaran yang bisa digunakan sebagai sarana informasi bagi masyarakat dalam membantu pelayanan publik. Metode yang digunakan mencakup survei di lapangan, pengumpulan data dari kelurahan dan lembaga terkait, pemrosesan data spasial dengan aplikasi pemetaan digital, serta pengujian hasil melalui perangkat di kelurahan. Hasil dari kegiatan tersebut adalah peta administratif yang mencakup batas-batas wilayah, jaringan jalan, serta lokasi titik-titik fasilitas publik seperti kantor kelurahan, puskesmas, sekolah, dan tempat ibadah. Peta tersebut ditempel di kantor kelurahan dan digunakan sebagai sarana informasi bagi warga serta bantuan dalam proses pelayanan administrasi. Dengan adanya peta ini, informasi tentang wilayah lebih mudah diakses, pelayanan publik menjadi lebih efektif, dan masyarakat bisa memahami kondisi wilayah Kelurahan Singonegaran secara lebih jelas.

Kata Kunci—*peta administratif; pelayanan publik; media informasi; pemetaan digital; Kelurahan Singonegaran*

Abstract— Administrative maps are spatial information tools that play an important role in assisting the delivery of public services at the village level. The village of Singonegaran does not yet have a clear map that is easily accessible to residents, making the dissemination of information about the area, boundaries, and public facilities less effective. This program aims to create an administrative map of Singonegaran Village that can be used as a source of information for the community in assisting public services. The methods used include field surveys, data collection from the sub-district and related institutions, spatial data processing with digital mapping applications, and testing the results using devices in the sub-district. The result of these activities is an administrative map that includes area boundaries, road networks, and the locations of public facilities such as the sub-district office, health center, schools, and places of worship. The map is displayed at the village office and used as a source of information for residents and an aid in the administrative service process. With this map, information about the area is more easily accessible, public services are more effective, and the community can understand the conditions of the Singonegaran Village area more clearly.

Keywords—*administrative map; public services; information media; digital mapping; Singonegaran Village*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Corresponding Author:

Dimas Agus Prasetyo,
Sistem Informasi,
Universitas Nusantara PGRI Kediri,
Email: dimasagusprasetyo092@gmail.com



I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik di tingkat kelurahan merupakan unsur penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara langsung. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan dituntut untuk menyediakan informasi wilayah yang akurat, jelas, dan mudah diakses untuk menunjang kualitas pelayanan publik (Ismail et al., 2025). Sebagai unit pemerintahan terdepan pelayanan publik, kelurahan membutuhkan data dan informasi wilayah yang akurat, sistematis, dan mudah diakses guna mendukung perencanaan pembangunan, pengelolaan wilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dimana peta berperan sebagai media visual sekaligus alat pendukung pengambilan keputusan.

Peta administratif merupakan salah satu bentuk informasi geospasial yang berfungsi sebagai alat penyaji data keruangan secara sistematis untuk mendukung kebutuhan pemerintahan dan masyarakat. Dalam pemerintahan tingkat kelurahan, peta administratif memiliki peran penting sebagai media informasi mengenai batas wilayah, jaringan jalan, serta lokasi fasilitas publik yang berkaitan langsung dengan pelayanan administrasi (Hartono et al., 2025). Informasi Geospasial menegaskan bahwa informasi geospasial diperlukan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Secara konseptual, peta merupakan alat komunikasi grafis yang menyampaikan informasi spasial kepada pengguna melalui simbol dan representasi visual yang terstruktur. Dalam hal ini, peta tidak hanya sekadar alat representasi spasial tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi yakni proses pemindahan pengetahuan atau informasi dari pembuat peta (kartografer) kepada pembaca peta (Ikhsan et al., 2025). Oleh karena itu, keberadaan peta administratif yang jelas dan mudah diakses menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

Namun, pada kenyataannya dalam pengabdian masyarakat oleh KKN-T 40 di Kelurahan Singonegaran menghadapi permasalahan yaitu belum memiliki peta administratif yang jelas, mutakhir, dan mudah ditemukan oleh warga. Informasi mengenai batas wilayah, pembagian administrasi, serta lokasi fasilitas umum seperti kantor kelurahan, puskesmas, sekolah, dan tempat ibadah belum terdokumentasi secara visual dalam satu media yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kebingungan dalam proses pelayanan administrasi sehingga tidak optimal sebagai media informasi yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan wilayah (Hutama & Thamrin, 2025). Padahal, pelayanan publik pada hakikatnya menuntut adanya kemudahan akses informasi, transparansi, dan efisiensi. Ketersediaan informasi spasial yang akurat juga menjadi salah satu unsur pendukung terwujudnya prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membuat peta administratif Kelurahan Singonegaran yang dapat digunakan sebagai sarana informasi bagi masyarakat dalam membantu pelayanan publik. Peta ini dirancang untuk memuat batas-batas wilayah, jaringan jalan, serta titik-titik fasilitas publik sehingga dapat menjadi referensi visual yang informatif bagi perangkat kelurahan maupun warga. Dengan tersedianya peta administratif yang representatif, diharapkan proses penyampaian informasi wilayah dapat dilakukan secara lebih cepat, jelas, dan terarah.

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah penyusunan peta administratif melalui tahapan survei lapangan, pengumpulan data dari pihak kelurahan dan lembaga terkait, pemrosesan data spasial menggunakan aplikasi pemetaan digital, serta pengujian dan validasi hasil bersama perangkat kelurahan. Pemanfaatan teknologi pemetaan digital sejalan dengan perkembangan dan pembaruan peta administrasi wilayah Singonegaran menggunakan teknologi Geographic Information System (GIS) untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat serta memungkinkan pengelolaan dan visualisasi data spasial secara lebih akurat dan efisien (Putri et al., 2021). Melalui pendekatan tersebut, peta yang dihasilkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dari segi ketepatan data.

Harapan dari kegiatan pengabdian ini adalah terwujudnya peningkatan efektivitas pelayanan publik di Kelurahan Singonegaran melalui penyediaan media informasi spasial yang mudah diakses. Peta yang ditempel di kantor kelurahan diharapkan mampu membantu masyarakat memahami kondisi wilayahnya secara lebih jelas serta mempermudah perangkat kelurahan dalam memberikan layanan administrasi. Dalam jangka panjang, keberadaan peta administratif ini diharapkan dapat mendorong budaya pengelolaan data spasial yang lebih tertib dan mendukung perencanaan pembangunan wilayah berbasis informasi yang akurat dan transparan.

II. METODE

Masyarakat ini menjadi sasaran utama pengabdian masyarakat KKN-T 40 Singonegaran karena program kerja ini berfokus pada pembuatan peta atau denah wilayah sebagai media informasi yang dapat membantu masyarakat memahami batas dan pembagian wilayah kelurahan Singonegaran yang terbagi menjadi 2 wilayah. Tahapan pengabdian masyarakat KKN-T 40 berupa observasi awal, perencanaan program kerja, pelaksanaan program kerja, pengamatan dan kesimpulan, kemudian tempat pengabdian masyarakat, yaitu tempat yang digunakan dalam melakukan pengabdian masyarakat untuk memperoleh data yang diinginkan (Sugiyono, 2019). Berikut tahapan program Pembuatan Peta Administratif yang dilakukan oleh KKN-T 40 di Kelurahan Singonegaran Kota Kediri:

- a. Tahapan Observasi
 - a. Pengamatan awal terhadap kondisi wilayah Kelurahan Singonegaran, meliputi batas wilayah.
 - b. Identifikasi lokasi fasilitas umum dan sosial, seperti sekolah, tempat ibadah, balai kelurahan, posyandu, dan UMKM.
 - c. Pengumpulan informasi awal melalui observasi lapangan dan koordinasi dengan perangkat kelurahan terkait data wilayah.
 - d. Pencatatan permasalahan yang muncul, seperti ketidakjelasan batas wilayah atau minimnya media informasi peta bagi masyarakat.
- b. Tahapan Perencanaan Program Kerja

- a. Penyusunan konsep peta wilayah yang informatif dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- b. Penentuan data yang akan dimasukkan ke dalam peta, seperti batas wilayah, fasilitas umum, dan potensi wilayah.
- c. Perencanaan metode pengumpulan data lanjutan melalui survei lapangan dan dokumentasi.
- d. Penentuan media peta yang akan digunakan, baik dalam bentuk cetak maupun digital.
- c. Tahap Pelaksanaan Program Kerja
 - a. Pelaksanaan survei lapangan untuk pengambilan data dan titik koordinat wilayah serta fasilitas umum.
 - b. Pengolahan data hasil survei menjadi peta wilayah menggunakan media atau aplikasi pendukung.
 - c. Penyusunan dan finalisasi peta wilayah Kelurahan Singonegaran.
 - d. Sosialisasi dan penyerahan hasil peta kepada pihak kelurahan sebagai media informasi wilayah.
- d. Tahap Evaluasi Program Kerja
 - a. Evaluasi kesesuaian peta dengan kondisi wilayah di lapangan.
 - b. Penilaian kejelasan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam peta.
 - c. Pengumpulan masukan dari perangkat kelurahan dan masyarakat terkait hasil peta.
 - d. Penyempurnaan peta berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan manfaat dan keakuratan data.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya pembuatan denah sebagai media informasi wilayah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode pemetaan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menghasilkan peta administrasi Kelurahan Singonegaran. Metode yang digunakan mencakup survei di lapangan, pengumpulan data dari kelurahan dan lembaga terkait, pemrosesan data spasial dengan aplikasi pemetaan digital, serta pengujian hasil melalui perangkat di kelurahan. Pengumpulan data dilakukan melalui empat sumber yaitu wawancara kelurahan, G-Maps, website dan puskesmas. Data spasial yang terkumpul kemudian diolah menggunakan perangkat lunak SIG seperti QGIS. Hasil dari kegiatan tersebut adalah peta administratif yang mencakup batas-batas wilayah, jaringan jalan, serta lokasi titik-titik fasilitas publik seperti kantor kelurahan, puskesmas, sekolah, dan tempat ibadah. Dengan adanya denah atau peta yang baik, diharapkan Program ini dapat menjadi kontribusi nyata mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi desa dalam hal transparansi informasi dan pengelolaan wilayah secara berkelanjutan lebih mudah mengenali dan memahami kondisi serta pembagian wilayah tempat tinggalnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. Secara administratif, wilayah ini memiliki karakteristik kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi serta dinamika

pelayanan publik yang cukup aktif. Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan perangkat kelurahan, ditemukan bahwa informasi batas wilayah administratif, pembagian RT/RW, serta fasilitas umum yang tersedia belum terdokumentasi secara visual dalam bentuk peta yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada kurang optimalnya pelayanan administrasi, terutama dalam hal verifikasi domisili, pemetaan potensi wilayah, serta pendataan berbasis wilayah. Oleh karena itu, pembuatan peta administratif menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan kelurahan. Proses penyusunan peta administratif dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data batas wilayah dan data kependudukan, verifikasi data bersama perangkat kelurahan, pengolahan data spasial menggunakan perangkat lunak pemetaan, serta validasi akhir sebelum pencetakan dan publikasi. Peta yang dihasilkan memuat informasi batas kelurahan, pembagian RW dan RT, jaringan jalan, fasilitas umum, serta titik-titik penting yang mendukung pelayanan publik.



Gambar 1. Foto bersama pemasangan peta administratif Singonegaran Kota Kediri

Hasil pelaksanaan pembuatan peta administratif menunjukkan bahwa peta administratif yang telah disusun memberikan manfaat signifikan bagi pihak kelurahan maupun masyarakat. Dari sisi kelembagaan, perangkat kelurahan menyatakan bahwa keberadaan peta tersebut mempermudah proses identifikasi wilayah dalam pelayanan administrasi, seperti pengurusan surat domisili, pendataan bantuan sosial, serta perencanaan kegiatan berbasis wilayah. Sementara itu, dari sisi masyarakat, peta administratif menjadi media informasi yang informatif dan edukatif mengenai struktur wilayah tempat tinggal mereka.

PEMBAHASAN

1. Peta Administratif sebagai Media Informasi Publik

Peta administratif merupakan representasi spasial yang menggambarkan batas wilayah dan struktur pemerintahan secara visual. Integrasi data spasial (batas wilayah, jaringan jalan) dan data atribut (RT/RW, fasilitas umum) menghasilkan visualisasi yang sistematis dan informatif. Menurut sejalan dengan konsep bahwa visualisasi spasial meningkatkan akurasi interpretasi data dibandingkan penyajian tekstual semata. Hal ini sejalan dengan (Patoding & Thamrin, 2025) yang menunjukkan peta administrasi sebagai media informasi seperti memuat informasi batas administratif desa, menampilkan beragam infrastruktur penting, seperti jaringan jalan utama yang menghubungkan antar dusun, fasilitas pendidikan berupa

sekolah dasar, tempat ibadah, balai desa, serta titik-titik fasilitas umum lainnya. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyediaan peta administratif mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang akurat dan terstruktur. Dengan demikian, peta administratif tidak hanya berfungsi sebagai representasi batas wilayah, tetapi juga sebagai media informasi publik yang mendukung kebutuhan masyarakat terhadap kejelasan informasi wilayah.

2. Kontribusi terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Salah satu indikator kualitas pelayanan publik adalah kemudahan akses informasi dan kejelasan prosedur layanan. Menurut (Lintang & Suherman, 2023) kemudahan akses informasi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan publik, khususnya pada pelayanan administrasi kependudukan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah tersedianya peta administratif, proses pelayanan yang berkaitan dengan identifikasi wilayah menjadi lebih cepat dan sistematis. Aparatur kelurahan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pengetahuan personal, melainkan memiliki referensi visual yang terstandar. Hal ini sejalan dengan (Fitriani & Jaya, 2023) yang menyatakan bahwa ketersediaan sistem informasi wilayah yang terstruktur dapat meningkatkan efektivitas dan konsistensi pelayanan publik di tingkat kelurahan.

3. Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Data Spasial

Dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik yang efektif memerlukan dukungan data yang akurat, termasuk data spasial. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sebelum adanya peta administratif, proses identifikasi wilayah seringkali bergantung pada pengetahuan personal aparatur atau dokumen tekstual yang kurang informatif secara visual. Menurut (Putri et al., 2021) pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam pelayanan publik mampu mempercepat proses pelayanan serta meningkatkan efisiensi kerja aparatur pemerintah. Setelah peta tersedia, proses pelayanan menjadi lebih sistematis dan efisien. Hal ini selaras dengan (Anisa et al., 2025) yang menyatakan bahwa peta tematik berbasis SIG dapat menjadi alat pendukung utama dalam optimalisasi pelayanan publik dan perencanaan wilayah di tingkat desa dan kelurahan.

4. Penguatan Literasi Spasial dan Pemberdayaan Masyarakat

Peta administratif turut meningkatkan literasi spasial masyarakat, yaitu kemampuan memahami dan memanfaatkan informasi geografis dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan (Kurnia & Marennu, 2025) yang menyatakan bahwa pemetaan wilayah yang dilakukan secara partisipatif tidak hanya menghasilkan peta administratif yang akurat, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa dalam memahami dan mengelola ruang wilayahnya secara lebih komprehensif. Masyarakat menjadi lebih memahami batas wilayah administratif, struktur RT/RW, serta lokasi fasilitas umum.

Berdasarkan hasil dan pembahasan program pembuatan peta administratif menunjukkan bahwa telah terbukti memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, informatif, dan transparan. pembuatan peta administratif ini memperkuat bahwa pemanfaatan data spasial dan visualisasi peta merupakan strategi yang relevan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil analisis dan pembahasan, mengacu pada penyelesaian masalah pengabdian kepada masyarakat. Saran dapat berupa masukan bagi kegiatan pengabdian berikutnya, dapat pula rekomendasi implikatif dari temuan hasil kegiatan pengabdian.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan peta administratif Kelurahan Singonegaran merupakan upaya untuk menjawab permasalahan belum tersedianya media informasi wilayah yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Hasil pelaksanaan dan pembahasan menunjukkan bahwa peta administratif yang dihasilkan mampu menyajikan informasi batas wilayah, pembagian RT/RW, jaringan jalan, serta lokasi fasilitas umum secara terintegrasi dan mudah dipahami. Keberadaan peta ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas pelayanan publik, karena membantu perangkat kelurahan dalam proses administrasi sekaligus memudahkan masyarakat dalam memahami kondisi wilayah tempat tinggalnya. Dengan demikian, pembuatan peta administratif dapat dinyatakan sebagai solusi yang tepat dan aplikatif dalam mendukung pelayanan publik yang lebih informatif, efisien, dan transparan di tingkat kelurahan.

Sebagai tindak lanjut, peta administratif yang telah dibuat diharapkan dapat diperbarui secara berkala agar tetap sesuai dengan perkembangan wilayah. Selain itu, pada kegiatan pengabdian selanjutnya, peta dapat dikembangkan dalam bentuk digital atau berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang lebih interaktif sehingga akses informasi wilayah dapat diperluas dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat maupun pemerintah kelurahan..

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, R., Dewi, C., Fadly, R., Sari, A., Febryanto, M., Prof, J., Brojonegoro, S., & Bandar, N. (2025). Digitalisasi Batas Administrasi Desa Sukanegara dalam Bentuk Peta Tematik Untuk Mendukung Sistem Informasi Desa. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 9(3).
- Fitriani, Y., & Jaya, W. R. (2023). Strategi Peningkatan Pelayanan Melalui Sistem Informasi Administrasi Di Kelurahan Komerling Agung. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 4(April), 36–42. <https://doi.org/10.46730/japs.v4i1.93>

- Hartono, B. A., Christiawan, A. V., Manullang, E. G. N., Hotadi, E., Perwita, K. A., Pasaribu, M. U., Kawak, M. Y., Roessli, N. C., Juan, R., Karmomjanaan, E., & Bagas, T. (2025). Digitalisasi Peta Administrasi Padukuhan Jambu dengan Teknologi GIS. *Jurnal Atma Inovasia (JAI0)*, 5(4).
- Hutama, M., & Thamrin, S. (2025). Pentingnya Pemetaan Wilayah Desa Tellu Limpo sebagai Pedoman Pembangunan Desa. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(7), 3741–3745.
- Ikhsan, M., Amelia, R. N., Sasmita, A., Salam, R., & Robo, T. (2025). Pelatihan Pembuatan Peta Tematik menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) bagi Guru Geografi MGMP Kota Ternate. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 4(1), 76–81. <https://doi.org/10.37905/ljpm.v4i1.31229>
- Ismail, A. R., Giu, J. D., & Pakaya, R. (2025). Implementasi Sistem Layanan Digital untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik di Kelurahan Molosipat W , Kota Barat. *Jurnal Abdimas Terapan (JAT)*, 5(177), 46–53.
- Kurnia, M., & Marennu, F. (2025). Optimalisasi Pemetaan Wilayah Desa Waringtasi sebagai Dasar Strategi Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(10), 4551–4555.
- Lintang, D., & Suherman, A. (2023). Standar Pelayanan Publik (Studi pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang) Public Service Standards (Studies on Population Administration Services in Jatiuwung District , Tangerang City). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 13(1). <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i1.3322>
- Patoding, K. E., & Thamrin, S. (2025). Pembuatan Peta Administrasi Desa dan Peta Wisata sebagai Media Informasi Desa Pasimarannu. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BANGSA*, 3(10), 5677–5683.
- Putri, R. A., Rahayu, M. J., Rini, E. F., Astuti, W., Mukaromah, H., Rahayu, P., & Andini, I. (2021). SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN (STUDI KASUS : KELURAHAN SONDAKAN , KECAMATAN LAWEYAN , KOTA SURAKARTA). *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Pemukiman*, 3, 189–200.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D*. CV ALFABETA.